

ANALISIS NILAI TUKAR PETANI PENGGARAP DI KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO

Hafid Deni Rahmadin

Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
(hafiddenirahmadin87@gmail.com)

Dr. Nugroho Hari P. S.P., M.Si.

Dosem pembimbing

Abstrak

Peran sektor pertanian telah terbukti dari keberhasilan pada saat krisis ekonomi yang lalu dalam menyediakan kebutuhan pangan pokok dengan jumlah yang memadai, dan tingkat pertumbuhannya yang positif dalam menjaga laju pertumbuhan nasional. Peran sektor pertanian masih cukup besar sebagai sumber pendapatan rumah tangga (Rusastra, 1998). Struktur pengeluaran rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah perubahan pengeluaran menurut waktu, perbedaan antar selera, perbedaan pendapatan dan lingkungan. Perilaku pengeluaran rumah tangga yang tersedia harus sesuai dengan tingkat kemampuan pendapatan yang diperoleh dan bagaimana mendistribusikannya, agar tidak terganggu untuk memenuhi kebutuhan dibawah tingkat kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pendapatan dan pengeluaran petani penggarap dan nilai tukar petani penggarap di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif yang dianalisis dengan teknik persentase dan rumus nilai tukar petani (NTP). Variabel-variabel yang digunakan adalah pendapatan dalam usaha tani, pendapatan di luar usaha tani, pengeluaran dalam usaha tani, dan pengeluaran di luar usaha tani.

Hasil penelitian menunjukkan pendapatan dalam usaha tani oleh petani penggarap sebagian besar berada pada rentang Rp 1.500.000 – Rp 3.700.000 untuk setiap panen sebesar 41%. Berdagang menjadi pilihan sebagian besar petani penggarap untuk menambah pendapatan di luar usaha tani dengan jumlah 74 petani. Sebagian besar pendapatan dari berdagang berada pada rentang Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 dengan jumlah 27 petani atau 36,5%. Pengeluaran paling besar dalam usaha tani digunakan untuk sewa lahan, terdapat 20 petani atau 20% yang mengeluarkan Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 untuk sewa lahan. Nilai tukar petani penggarap di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah 1,13 yang artinya petani tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan subsistennya.

Kata Kunci: Petani Penggarap, Pendapatan, Pengeluaran, Nilai Tukar Petani

Abstract

The role of the agricultural sector has been proven by the success of the past economic crisis in providing sufficient quantities of basic staple food, and a positive growth rate in maintaining the national growth rate. The role of the agricultural sector is still quite large as a source of household income (Rusastra, 1998). Meanwhile, the structure of household expenditure is influenced by several things such as changes in expenditure by time, differences between tastes, income and environmental differences. Available household expenditure behavior should match the level of earning ability obtained and how to distribute it, so as not to be shaken to meet the needs below the welfare level.

This study aims to determine the income and expenditure of farmers and the exchange rate of farmers in the sub-district Gedeg Mojokerto regency. The type of research is descriptive quantitative which is analyzed by percentage technique and farmer exchange rate formula (NTP). The variables used are income in farming, non-farm income, expenses in farming, and out-of-farm expenses.

The results showed that farmers' income in the farming business was mostly in the range of Rp 1,500,000 - Rp 3,700,000 for each harvest of 41%. Trade is the choice of most of the farmers to increase income outside farming with 74 farmers. Most of the income from trading is in the range of Rp 1,000,000 to Rp 1,500,000 with a total of 27 farmers or 36.5%. The largest expenditure in farming is used for land lease, there are 20 farmers or 20% who spend Rp 6,000,000 - Rp 8,000,000 for land rent. The exchange rate of farmers in Kecamatan Gedeg Mojokerto regency is 1.13 which means that farmers do not lack in fulfilling their subsistence needs.

Keywords: Farmers, Income, Expenditure, Farmer's Term of Trade

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup disektor pertanian. menyosong era perdagangan bebas diperlukan suatu usaha yang mampu mendayagunakan potensi secara maksimal sehingga mampu bersaing dan dapat meningkatkan pendapatan serta taraf hidup masyarakat. Padi merupakan tanaman pangan yang menghasilkan beras sebagai sumber makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Pelita IV Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengekspor beras yaitu dengan dicapainya swasembada beras. Namun saat ini Indonesia kembali terpuruk menjadi negara importir beras. lahan pertanian yang semakin sempit sebagai salah satu penyebab utamanya.

Padi merupakan tanaman pertanian dan sampai sekarang merupakan tanaman utama dunia. Sejak dahulu, diantara tanaman bahan makanan, padi merupakan tanaman utama para petani Indonesia. Padi dapat ditanam dilahan kering maupun lahan basah atau biasa disebut sawah. Para petani di Indonesia mayoritas merupakan petani kecil atau petani gurem dengan luas lahan usahatani yang sempit. Diantara lahan yang sempit tersebut tidak semuanya berbentuk sawah. Sebagian besar sebagai lahan kering yang ditanami berbagai palawija, buah-buahan dan sayuran (Pitojo, 2006 : 236).

Berdasarkan sistem pengairan, sawah di Indonesia dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi setengah teknis, sawah irigasi pedesaan, sawah pasang surut, sawah tadah hujan dan sawah gogo rancah. Untuk padi sawah, pengairan sangat penting karena sangat mempengaruhi produktivitasnya. Sekitar 80% produksi padi Indonesia dihasilkan dari daerah sawah beririgasi baik di Sumatera maupun di luar Sumatera. Sawah dengan irigasi teknis menghasilkan padi yang paling tinggi per hektarnya dibanding hasil padi sawah lainnya namun, peningkatan produksi padi tersebut tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan karena luas keseluruhan areal pertanian, terutama sawah beririgasi tidak bertambah tetapi berkurang. Keadaan ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga banyak lahan yang digunakan untuk pemukiman atau industri/prasarana sedangkan air untuk irigasi dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga.

Ditinjau dari perspektif pembangunan pertanian secara lebih luas, bahwa pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih baik, sekalipun pilihan prioritas pada kebijaksanaan industrialisasi sudah dijatuhkan namun, sektor pertanian dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan surplus. Hal ini terjadi bila produktivitas di perbesar sehingga menghasilkan pendapatan petani yang lebih tinggi dan memungkinkan mereka menabung dan mengakumulasi modal (Rahardjo, 1995). Pembangunan pertanian merupakan proses yang dinamis membawa dampak perubahan struktural sosial dan ekonomi, pembangunan pertanian dihadapkan pada kondisi lingkungan strategis, terus berkembang yang diarahkan pada komoditas unggulan yang mampu bersaing hingga ke pasar internasional, hal ini dihubungkan dengan kemajuan iptek di sektor pertanian untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan pasar (Salim, 1984). Tujuan kebijakan ekonomi

adalah menciptakan kemakmuran, salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan. Pendapatan regional adalah tingkat besarnya pendapatan pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut (Tarigan, 2005). Pembangunan ekonomi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan saat ini, sementara pembangunan itu sendiri pada mulanya diartikan sebagai peningkatan kapasitas ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasional per jiwa/kapita/penduduk (Salim, 1984:127).

Peran sektor pertanian telah terbukti dari keberhasilan pada saat krisis ekonomi yang lalu dalam menyediakan kebutuhan pangan pokok dengan jumlah yang memadai, dan tingkat pertumbuhannya yang positif dalam menjaga laju pertumbuhan nasional. Keadaan ini menjadi pertimbangan utama dirumuskannya kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap sektor pertanian, dalam memperluas lapangan kerja, menghapus kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih luas. Walaupun dalam pertumbuhannya dari hasil penelitian Rusastra *et al* (1997) ditemukan bahwa selama 10 tahun (1983-1993) peran sektor pertanian dalam struktur ekonomi Indonesia mengalami penurunan dari 24,5 persen menjadi 18,3 persen. Namun demikian sektor pertanian masih merupakan penampung bagi pekerja di pedesaan. Hal ini ditunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian masih cukup tinggi. Ironisnya angka kemiskinan dari total penduduk miskin 36 juta jiwa pada tahun 2004, diantaranya sekitar 21 juta jiwa atau 35 persen bekerja di sektor pertanian dan pedesaan.

Salah satu faktor besarnya angka kemiskinan seperti rendahnya pendapatan yang diterima sebagai akibat rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dengan upah riil yang diterima juga rendah. Disamping itu kurang berkembangnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas kerja di sektor ekonomi pedesaan yang mengakibatkan mengalirnya tenaga kerja usia muda terdidik ke wilayah perkotaan (Spare and Haris, 1986; Manning 1992). Salah satu penyebab lambannya peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah lambannya peningkatan upah riil buruh pertanian (Manning dan Jayasura, 1996) atau mengalami stagnasi, sementara upah riil non tani mengalami penurunannya (Erwido et al., 1993 : 57).

Diharapkan berkembangnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha disektor luar pertanian merupakan alternatif kegiatan dan sumber pendapatan masyarakat pedesaan terutama bagi para petani berlahan sempit (*small size land holding farmers*) dan petani tanpa lahan (*landless farmers*). Akan tetapi pada kenyataannya, peran sektor pertanian masih cukup besar sebagai sumber pendapatan rumah tangga (Rusastra, 1998). Walaupun dalam hasil analisis Sensus Pertanian 1983-1993 terjadi penurunan usaha pertanian, seperti di pulau Jawa turun dari 47,8 persen menjadi 40,7 persen, luar Jawa turun dari 61,7 persen menjadi 68,9 persen. Besarnya peran sektor pertanian sebagai pendapatan rumah tangga adalah merupakan akumulasi peran antar subsektor, terutama subsektor tanaman pangan dan hortikultura, yang mempunyai peran sangat besar dalam pendapatan rumah tangga, disamping diversifikasi

pendapatan dari subsektor perkebunan dan peternakan, kehutanan maupun usaha nonpertanian.

Struktur pengeluaran rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah perubahan pengeluaran menurut waktu, perbedaan antar selera, perbedaan pendapatan dan lingkungan. Perilaku pengeluaran rumah tangga yang tersedia harus sesuai dengan tingkat kemampuan pendapatan yang diperoleh dan bagaimana mendistribusikannya, agar tidak terganggu untuk memenuhi kebutuhan dibawah tingkat kesejahteraan. Pada dasarnya akses kebutuhan rumah tangga terhadap pengeluaran bahan pangan dan bahan bukan makanan yang dibutuhkan sangat tergantung dari daya beli, tingkat pendapatan, harga pangan, proses distribusi, kelembagaan tingkat lokal, maupun kondisi sosial lainnya.

Pada umumnya konsumsi/pengeluaran rumah tangga berupa kebutuhan pangan dan kebutuhan non pangan yang di pengaruhi oleh tingkat pendapatan, bisa terjadi apabila tingkat pendapatan relatif rendah maka terlebih dahulu memprioritaskan kebutuhan pengeluaran akan memprioritaskan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dibanding bukan makanan. Namun demikian seiring dengan pergeseran dan peningkatan pendapatan, proporsi pola pengeluaran untuk bahan makanan akan menurun dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan non pangan. Seiring dengan kondisi tersebut akan terukur tingkat kesejahteraan masyarakat, apakah pendapatan rumah tangga yang diterima dari berbagai sumber matapencarian mampu dibelanjakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan pangan dan non pangan.

Maka diperlukan penelitian “Analisis Nilai Tukar Petani Penggarap di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto” Penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah gambaran terkait dengan ketahanan pangan analisis pendapatan dan pengeluaran petani di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan tujuan penelitian yang antara lain; 1) mengetahui pendapatan yang diperoleh petani penggarap di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto; 2) mengetahui pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani penggarap di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudian jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Menurut Kuncoro (2002:172) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Misalkan dalam bentuk tabel atau grafik. .

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani penggarap yang ada di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Sampel penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel penelitian sebanyak 100 yang tersebar pada 14 desa di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Sugiyono (2008: 61) menjelaskan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas

maka variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah indikator-indikator pendapatan dengan pengeluaran petani penggarap di daerah penelitian.

HASIL PENELITIAN

A. Analisis deskriptif kuantitatif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan dalam penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu klausa peristiwa pada saat sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran ataupun keadaan suatu objek secara sistematis aktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. (Kuncoro. 2003 : 215).

1. Sistem Budidaya Petani Penggarap

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan di lokasi penelitian, terdapat 3 jenis sistem budaya relasi antara pemilik dan penggarap. Sistem ini terbentuk atas kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Sistem ini merupakan sistem warisan dari masa lalu. Adapun penjelesannya antara lain:

a. Sistem *ngedok*

Dalam sistem *ngedok* biaya operasional dan produksi yang ditanggung penggarap adalah menanam, menyiangi, dan memanen (*ngemit*), sisanya ditanggung pemilik lahan. Pembagian hasilnya adalah setiap kelipatan 1 kwintal hasil, penggarap mendapatkan 20 kg. Sebagai contoh, jika dalam *boto* 200 mendapatkan padi sebesar 2000 kg, maka upah untuk penggarap adalah 400 kg, sisanya 1600 kg untuk pemilik lahan.

b. Sistem *pertelon*

Dalam sistem *pertelon*, biaya operasional dan produksi ditanggung penggarap, memiliki proporsi pembagian hasil yaitu 1/3 hasil untuk pemilik lahan, 2/3 hasil untuk penggarap lahan. Pembayaran menggunakan hasil tani berupa gabah, dibayar setiap selesai panen.

c. Sistem sewa *setaun*

Dalam sistem sewa biaya operasional dan produksi ditanggung penggarap. Penggarap membayar biaya sewa lahan sebesar Rp 2.000.000 untuk setiap *boto satus* dalam jangka waktu 1 tahun. Uang sewa dibayar diawal.

2. Analisis Pendapatan dan Pengeluaran

a. Pendapatan dari hasil garapan

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha garapan, yang dihitung dari penjualan hasil panen yang disepakati dengan pemilik sesuai dengan sistem budidaya yang disepakati.

Tabel Pendapatan Hasil Usaha Tani dari Petani Penggarap

No	Pendapatan	Jumlah Petani	Presentase
1	Rp 1.500.000 – Rp 3.700.000	41	41%
2	Rp 3.700.000 – Rp 5.900.000	28	28%
3	Rp 5.900.000 – Rp 8.100.000	16	16%
4	> Rp 8.100.000	15	15%
Jumlah		100	100%

Berdasarkan tabel diatas, petani yang memiliki pendapatan dari hasil usaha tani (dalam satu kali masa panen) antara 1.500.000 sampai dengan 3.700.000 berjumlah 41 petani dari 100 sampel atau 41% dari jumlah sampel. Petani yang memiliki pendapatan dari hasil usaha tani (dalam satu kali masa panen) antara 3.700.000 sampai dengan 5.900.000 berjumlah 28 petani dari 100 sampel atau 28% dari jumlah sampel. Petani yang memiliki pendapatan dari hasil usaha tani (dalam satu kali masa panen) antara 5.900.000 sampai dengan 8.100.000 berjumlah 16 petani dari 100 sampel atau 16% dari jumlah sampel. Petani yang memiliki pendapatan dari hasil usaha tani (dalam satu kali masa panen) > 8.100.000 berjumlah 15 petani dari 100 sampel atau 15% dari jumlah sampel.

b. Pendapatan diluar hasil garapan

Merupakan pendapatan yang diperoleh petani penggarap yang berasal dari luar usaha tani dalam jangka waktu satu bulan. Sumber pendapatan yang digunakan antara lain:

1. Usaha dagang

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 40 sampel dari 100 sampel yang melakukan usaha dagang, atau 40%. Adapun macam dagang yang dilakukan adalah toko kelontong, warung kopi, dan usaha dagang makanan atau minuman lainnya. Terdapat empat klasifikasi terkait jumlah pendapatan yang diperoleh dalam waktu satu bulan.

Tabel Pendapatan di Luar Usaha Tani (Dagang)

No	Pendapatan dari usaha dagang	Jumlah Petani yang Berdagang	Presentase dari Jumlah Sampel
1	Rp 500.000 – Rp 1.000.000	13	13%
2	Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000	21	21%
3	Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000	4	4%
4	> Rp 2.000.000	2	2%
Jumlah		40	40%

Terdapat 13 petani yang melakukan usaha dagang dengan pendapatan antara 500.000 – 1.000.000 atau sekitar 32,5% dari 40 petani yang

berdagang dan 13% dari jumlah sampel. Terdapat 21 petani yang melakukan usaha dagang dengan pendapatan antara 1.000.000 – 1.500.000 atau sekitar 52,5% dari 40 petani yang berdagang dan 21% dari jumlah sampel. Terdapat 4 petani yang melakukan usaha dagang dengan pendapatan antara 1.500.000 – 2.000.000 atau sekitar 10% dari 40 petani yang berdagang dan 4% dari jumlah sampel. Terdapat 2 petani yang melakukan usaha dagang dengan pendapatan antara > 2.000.000 atau sekitar 5% dari 40 petani yang berdagang dan 2% dari jumlah sampel.

1) Usaha jasa

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 27 sampel dari 100 sampel yang melakukan usaha jasa atau 27%. Adapun macam jasa yang dilakukan adalah tukang bangunan, tukang ojek, supir. Terdapat empat klasifikasi terkait jumlah pendapatan yang diperoleh dalam waktu satu bulan.

Tabel Pendapatan di Luar Usaha Tani (Jasa)

No	Pendapatan dari Jasa	Jumlah Petani pemilik Usaha Jasa	Presentase dari Jumlah Sampel
1	Rp 500.000 – Rp 1.000.000	15	15%
2	Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000	8	8%
3	Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000	3	3%
4	> Rp 2.000.000	1	1%
Jumlah		27	27%

Terdapat 15 petani yang melakukan usaha jasa dengan pendapatan antara 500.000 – 1.000.000 atau sekitar 55,6% dari 27 petani yang memiliki usaha jasa dan 15% dari jumlah sampel. Terdapat 8 petani yang memiliki usaha jasa dengan pendapatan antara 1.000.000 – 1.500.000 atau sekitar 29,6% dari 27 petani yang memiliki usaha jasa dan 8% dari jumlah sampel. Terdapat 3 petani yang memiliki usaha jasa dengan pendapatan antara 1.500.000 – 2.000.000 atau sekitar 11,1% dari 27 petani yang memiliki usaha jasa dan 3% dari jumlah sampel. Terdapat 1 petani yang memiliki usaha jasa dengan pendapatan antara > 2.000.000 atau sekitar 3,7% dari 27 petani yang memiliki usaha jasa dan 1% dari jumlah sampel.

2) Buruh non pertanian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 74 sampel dari 100 sampel yang menjadi buruh non pertanian atau 74%. Adapun macam buruh non pertanian yang dilakukan adalah kuli bangunan, buruh pabrik lepas. Terdapat empat klasifikasi terkait jumlah pendapatan yang diperoleh dalam waktu satu bulan.

Tabel 4.6 Pendapatan di Luar Usaha Tani (Buruh non Pertanian)

No	Pendapatan dari remiten	Jumlah Petani non Pertanian	Presentase dari Jumlah Sampel
1	Rp 500.000 – Rp 1.000.000	23	23%
2	Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000	27	36%
3	Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000	18	24%
4	> Rp 2.000.000	6	18%
Jumlah		65	65%

Terdapat 23 petani yang menjadi buruh non pertanian dengan pendapatan antara 500.000 – 1.000.000 atau sekitar 31,1% dari 74 petani yang menjadi buruh non pertanian dan 23% dari jumlah sampel. Terdapat 27 petani yang melakukan menjadi buruh non pertanian dengan pendapatan antara 1.000.000 – 1.500.000 atau sekitar 36,5% dari 74 petani yang menjadi buruh non pertanian dan 27% dari jumlah sampel. Terdapat 18 petani yang menjadi buruh non pertanian dengan pendapatan antara 1.500.000 – 2.000.000 atau sekitar 24,3% dari 74 petani yang menjadi buruh non pertanian dan 18 % dari jumlah sampel. Terdapat 6 petani yang menjadi buruh non pertanian dengan pendapatan antara > 2.000.000 atau sekitar 8,1% dari 74 petani yang menjadi buruh non pertanian dan 6% dari jumlah sampel.

3) Remiten

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 65 sampel dari 100 sampel yang menerima remiten atau 65%. Adapun keluarga yang bekerja di luar wilayah bekerja sebagai pedagang, buruh pabrik, wiraswasta. Terdapat empat klasifikasi terkait jumlah pendapatan yang diperoleh dalam waktu satu bulan.

Tabel 4.7 Pendapatan di Luar Usaha Tani (Remiten)

No	Pendapatan dari remiten	Jumlah Petani penerima Remiten	Presentase dari Jumlah Sampel
1	Rp 500.000 – Rp 1.000.000	27	27%
2	Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000	28	28%
3	Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000	7	7%
4	> Rp 2.000.000	3	3%
Jumlah		65	65%

Terdapat 27 petani yang menerima remiten dengan pendapatan antara 500.000 – 1.000.000 atau sekitar 41,5% dari 65 petani yang menerima remiten dan 27% dari jumlah sampel. Terdapat 28 petani yang menerima remiten dengan pendapatan antara 1.000.000 – 1.500.000 atau sekitar 43,1% dari 65 petani yang

menerima remiten dan 28% dari jumlah sampel. Terdapat 7 petani yang menerima remiten dengan pendapatan antara 1.500.000 – 2.000.000 atau sekitar 10,8% dari 65 petani yang menerima remiten dan 7% dari jumlah sampel. Terdapat 3 petani yang menerima remiten dengan pendapatan antara > 2.000.000 atau sekitar 4,6% dari 65 petani yang menerima remiten dan 3% dari jumlah sampel.

a. Pengeluaran dalam garapan

Merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani penggarap dalam proses usaha tani. Yaitu proses operasional mulai dari fase menanam sampai fase memanen. Tentunya ini dipengaruhi oleh sistem budidaya yang disepakati. Sesuai dengan penjelasan tentang sistem budidaya petani penggarap diatas, antara lain sistem *pertelon*, sistem *ngedok*, dan sistem sewa *setaun*. Sistem tersebut mempengaruhi jumlah pengeluaran petani penggarap dalam proses pertanian.

1) Operasional tanam (membajak, mencangkul, menanam)

Dalam proses penanaman padi, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar memperoleh hasil yang maksimal yakni; membajak untuk menggemburkan tanah; mencangkul pematang untuk meminimalisir tumbuhnya rumput liar; dan menanam bibit padi. Terdapat empat klasifikasi terkait jumlah pengeluaran dalam proses penanaman. Terdapat 8 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses penanaman sebesar Rp 200.000 – Rp 750.000 atau sekitar 8% dari jumlah sampel. Pengeluaran ini merupakan pengaruh dari sistem budidaya yang digunakan yakni sistem *ngedok*. Terdapat 8 petani yang menggunakan sistem ini. Terdapat 51 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses penanaman sebesar Rp 750.000 – Rp 1.300.000 atau sekitar 51% dari jumlah sampel. Terdapat 26 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses penanaman sebesar Rp 1.300.000 – Rp 2.850.000 atau sekitar 26% dari jumlah sampel. Terdapat 15 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses penanaman sebesar > Rp 2.850.000 atau sekitar 15% dari jumlah sampel.

2) Operasional pemeliharaan (memupuk, menyiangi)

Dalam proses pemeliharaan padi, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar memperoleh hasil yang maksimal yakni; memupuk untuk menyuburkan tanah; menyiangi untuk membersihkan rumput liar yang tumbuh di tengah tanaman padi. Terdapat empat klasifikasi terkait jumlah pengeluaran dalam proses pemeliharaan.

Terdapat 8 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemeliharaan sebesar Rp 400.000 – Rp 690.000 atau sekitar 8% dari jumlah sampel. Pengeluaran ini merupakan pengaruh dari sistem budidaya yang digunakan yakni sistem *ngedok*. Terdapat 8 petani yang menggunakan sistem ini. Terdapat 47 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemeliharaan sebesar Rp 690.000 – Rp 980.000 atau sekitar 47% dari jumlah sampel. Terdapat 29 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemeliharaan sebesar Rp 980.000 – Rp 1.270.000 atau sekitar 29% dari jumlah sampel. Terdapat 16 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemeliharaan sebesar > Rp 1.270.000 atau sekitar 16% dari jumlah sampel.

3) Operasional panen (memotong, memindahkan, menggiling)

Terdapat 36 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemanenan sebesar Rp 500.000 – Rp 750.000 atau sekitar 36% dari jumlah sampel. Terdapat 29 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemanenan sebesar Rp 750.000 – Rp 1.000.000 atau sekitar 29% dari jumlah sampel. Terdapat 23 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemanenan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.250.000 atau sekitar 23% dari jumlah sampel. Terdapat 12 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemanenan sebesar > Rp 1.250.000 atau sekitar 12% dari jumlah sampel.

4) Pengeluaran lain (benih, pestisida, pupuk, biaya pengairan)

Dalam proses penanaman hingga pemanenan padi, ada beberapa beberapa pengeluaran terkait dengan pembelian benih, perstisida, hingga pengairan sawah. Terdapat empat klasifikasi terkait jumlah pengeluaran dalam proses pemeliharaan.

Terdapat 32 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 500.000 – Rp 750.000 atau sekitar 32% dari jumlah sampel. Terdapat 33 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 750.000 – Rp 1.000.000 atau sekitar 33% dari jumlah sampel. Terdapat 21 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.250.000 atau sekitar 21% dari jumlah sampel. Terdapat 14 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar > Rp 1.250.000 atau sekitar 14% dari jumlah sampel.

5) Sewa lahan

Bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri akan melakukan sewa terhadap lahan orang lain. Adapun harga sewa berada di kisaran Rp 2.000.000 untuk luas lahan

boto 100 dalam jangka waktu satu tahun. Semakin luas lahan yang disewa maka biaya sewa semakin mahal. Terdapat empat klasifikasi terkait jumlah pengeluaran dalam proses pemeliharaan. Dalam penelitian ini, hanya petani penggarap dengan sistem sewa yang memiliki pengeluaran sewa lahan. Dari 100 petani yang dijadikan sampel, terdapat 69 petani penggarap yang melakukan sistem sewa, 31 petani menggunakan sistem *ngedok* dan *pertelon*.

Terdapat 16 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 2.000.000 – Rp 4.000.000 atau sekitar 23,2% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 17 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 atau sekitar 24,6% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 20 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 sekitar 29,0% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 16 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar > Rp 8.000.000 atau sekitar 23,2% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan.

b. Pengeluaran di luar garapan

Merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani penggarap dalam kehidupan sehari-hari di luar proses usaha tani, seperti halnya keperluan rumah, sandang, pendidikan, dan sebagainya. Yang menjadi titik penting dalam survey adalah pangan, tagihan listrik, biaya pendidikan, dan komunikasi/transportasi. Dalam survei, jangka waktu yang digunakan sebagai kontrol adalah satu bulan pengeluaran.

1) Pangan

Pangan merupakan kebutuhan primer dari setiap manusia. Termasuk juga para petani penggarap di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Pangan sebagai sarana keberlangsungan hidup memiliki tingkat urgensi paling tinggi. Dalam penelitian ini terdapat empat klasifikasi pengeluaran.

Terdapat 24 petani yang memiliki pengeluaran pangan sebesar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 atau sekitar 24% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 46 petani yang memiliki pengeluaran pangan sebesar Rp Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 atau sekitar 46% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 19 petani yang memiliki pengeluaran pangan sebesar Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 sekitar 19% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 11 petani yang memiliki pengeluaran pangan sebesar > Rp

2.000.000 atau sekitar 11% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan.

2) Listrik

Terdapat 19 petani yang memiliki pengeluaran listrik sebesar Rp 30.000 – Rp 50.000 atau sekitar 19% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 35 petani yang memiliki pengeluaran listrik sebesar Rp 50.000 – Rp 70.000 atau sekitar 35% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 34 petani yang memiliki pengeluaran listrik sebesar Rp 70.000 – Rp 90.000 sekitar 34% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 12 petani yang memiliki pengeluaran listrik sebesar > Rp 90.0000 atau sekitar 12% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan.

3) Biaya Pendidikan

Terdapat 33 petani yang memiliki pengeluaran pendidikan sebesar Rp 200.000 – Rp 300.000 atau sekitar 33% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 36 petani yang memiliki pengeluaran pendidikan sebesar Rp 300.000 – Rp 400.000 atau sekitar 36% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 22 petani yang memiliki pengeluaran pendidikan sebesar Rp 400.000 – Rp 500.000 sekitar 22% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 9 petani yang memiliki pengeluaran pendidikan sebesar > Rp 500.000 atau sekitar 9% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan.

4) Komunikasi

Terdapat 33 petani yang memiliki pengeluaran komunikasi sebesar Rp 20.000 – Rp 30.000 atau sekitar 33% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 39 petani yang memiliki pengeluaran komunikasi sebesar Rp 30.000 – Rp 40.000 atau sekitar 39% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 28 petani yang memiliki pengeluaran komunikasi sebesar Rp 40.000 – Rp 50.000 sekitar 28% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan.

5) Transportasi

Terdapat 43 petani yang memiliki pengeluaran transportasi sebesar Rp 50.000 – Rp 150.000 atau sekitar 43% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 44 petani yang memiliki pengeluaran transportasi sebesar Rp 150.000 – Rp 250.000 atau sekitar 44% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 8 petani yang memiliki pengeluaran transportasi sebesar Rp 250.000 – Rp 350.000 sekitar 8% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 5 petani yang memiliki

pengeluaran transportasi sebesar > Rp 350.000 atau sekitar 5% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan.

Tabel Pendapatan dan Pengeluaran Petani Penggarap di Kecamatan Gedeg

Aspek	Jumlah (dalam ribu)
Pendapatan dalam usaha tani	
Pendapatan Jumlah	592.300
Pendapatan di luar usaha tani	
Pendapatan dari usaha dagang	61500
Pendapatan dari jasa	44750
Pendapatan dari usaha Buruh non pertanian	107250
Pendapatan dari remiten	74250
Jumlah	287750
Pengeluaran dalam usaha tani	
Pengeluaran dalam tahap penanaman	165700
Pengeluaran dalam tahap pemeliharaan	98870
Pengeluaran dalam tahap pemanenan	90250
Pengeluaran lain	91750
Pengeluaran Sewa Lahan	138900
Jumlah	585470
Pengeluaran di luar usaha tani	
Pengeluaran Pangan	131000
Pengeluaran Listrik	6780
Pengeluaran pendidikan	34500
Pengeluaran Komunikasi	3450
Pengeluaran Transportasi	17500
Jumlah	193230

$$NTPRP = Y/E$$

$$Y = Y_p + Y_{NP}$$

$$E = E_p + E_K$$

$$Y = 592.300 + 287.750 = 880.050$$

$$E = 585.470 + 193.230 = 778.700$$

$$NTPRP = 880.050/778.700 = 1,13$$

Dengan tolok ukur nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) sebagai penanda tingkat kesejahteraan yang merupakan nisbah antara pendapatan dan pengeluaran, maka dapat terukur besarnya tingkat kesejahteraan petani selama melakukan aktifitasnya. Pada perhitungan diatas menunjukkan NTPRP terhadap total pengeluaran bernilai lebih dari satu, yang artinya petani penggarap di Kecamatan Gedeg bersifat sejahtera dalam kebutuhan subsistennya.

PEMBAHASAN

A. Pendapatan

Terdapat 41 petani penggarap yang memperoleh pendapatan antara Rp 1.500.000 – Rp 3.700.000 atau 41% dari total sampel. Terdapat 28 petani penggarap yang memperoleh pendapatan antara Rp 3.700.000 – Rp 5.900.000 atau 28% dari total sampel. Terdapat 16 petani penggarap yang memperoleh pendapatan antara Rp 5.900.000 – Rp 8.100.000 atau 16% dari total sampel. Terdapat 15 petani penggarap yang memperoleh pendapatan lebih dari Rp 8.100.000 atau 15% dari total sampel.

Terdapat 13 petani yang melakukan usaha dagang dengan pendapatan antara 500.000 – 1.000.000 atau sekitar 32,5% dari 40 petani yang berdagang dan 13% dari jumlah sampel. Terdapat 21 petani yang melakukan usaha dagang dengan pendapatan antara 1.000.000 – 1.500.000 atau sekitar 52,5% dari 40 petani yang berdagang dan 21% dari jumlah sampel. Terdapat 4 petani yang melakukan usaha dagang dengan pendapatan antara 1.500.000 – 2.000.000 atau sekitar 10% dari 40 petani yang berdagang dan 4% dari jumlah sampel. Terdapat 2 petani yang melakukan usaha dagang dengan pendapatan antara > 2.000.000 atau sekitar 5% dari 40 petani yang berdagang dan 2% dari jumlah sampel.

Terdapat 15 petani yang melakukan usaha jasa dengan pendapatan antara 500.000 – 1.000.000 atau sekitar 55,6% dari 27 petani yang memiliki usaha jasa dan 15% dari jumlah sampel. Terdapat 8 petani yang memiliki usaha jasa dengan pendapatan antara 1.000.000 – 1.500.000 atau sekitar 29,6% dari 27 petani yang memiliki usaha jasa dan 8% dari jumlah sampel. Terdapat 3 petani yang memiliki usaha jasa dengan pendapatan antara 1.500.000 – 2.000.000 atau sekitar 11,1% dari 27 petani yang memiliki usaha jasa dan 3% dari jumlah sampel. Terdapat 1 petani yang memiliki usaha jasa dengan pendapatan antara > 2.000.000 atau sekitar 3,7% dari 27 petani yang memiliki usaha jasa dan 1% dari jumlah sampel.

Terdapat 23 petani yang menjadi buruh non pertanian dengan pendapatan antara 500.000 – 1.000.000 atau sekitar 31,1% dari 74 petani yang menjadi buruh non pertanian dan 23% dari jumlah sampel. Terdapat 27 petani yang melakukan menjadi buruh non pertanian dengan pendapatan antara 1.000.000 – 1.500.000 atau sekitar 36,5% dari 74 petani yang menjadi buruh non pertanian dan 27% dari jumlah sampel. Terdapat 18 petani yang menjadi buruh non pertanian dengan pendapatan antara 1.500.000 – 2.000.000 atau sekitar 24,3% dari 74 petani yang menjadi buruh non pertanian dan 18% dari jumlah sampel. Terdapat 6 petani yang menjadi buruh non pertanian dengan pendapatan antara > 2.000.000 atau sekitar 8,1% dari 74 petani yang menjadi buruh non pertanian dan 6% dari jumlah sampel.

Terdapat 27 petani yang menerima remiten dengan pendapatan antara 500.000 – 1.000.000 atau sekitar 41,5%

dari 65 petani yang menerima remiten dan 27% dari jumlah sampel. Terdapat 28 petani yang menerima remiten dengan pendapatan antara 1.000.000 – 1.500.000 atau sekitar 43,1% dari 65 petani yang menerima remiten dan 28% dari jumlah sampel. Terdapat 7 petani yang menerima remiten dengan pendapatan antara 1.500.000 – 2.000.000 atau sekitar 10,8% dari 65 petani yang menerima remiten dan 7% dari jumlah sampel. Terdapat 3 petani yang menerima remiten dengan pendapatan antara > 2.000.000 atau sekitar 4,6% dari 65 petani yang menerima remiten dan 3% dari jumlah sampel.

B. Pengeluaran

Terdapat 8 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses penanaman sebesar Rp 200.000 – Rp 750.000 atau sekitar 8% dari jumlah sampel. Pengeluaran ini merupakan pengaruh dari sistem budidaya yang digunakan yakni sistem *ngedok*. Terdapat 8 petani yang menggunakan sistem ini. Terdapat 51 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses penanaman sebesar Rp 750.000 – Rp 1.300.000 atau sekitar 51% dari jumlah sampel.

Terdapat 26 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses penanaman sebesar Rp 1.300.000 – Rp 2.850.000 atau sekitar 26% dari jumlah sampel. Terdapat 15 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses penanaman sebesar > Rp 2.850.000 atau sekitar 15% dari jumlah sampel. Terdapat 8 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemeliharaan sebesar Rp 400.000 – Rp 690.000 atau sekitar 8% dari jumlah sampel. Pengeluaran ini merupakan pengaruh dari sistem budidaya yang digunakan yakni sistem *ngedok*. Terdapat 8 petani yang menggunakan sistem ini. Terdapat 47 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemeliharaan sebesar Rp 690.000 – Rp 980.000 atau sekitar 47% dari jumlah sampel. Terdapat 29 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemeliharaan sebesar Rp 980.000 – Rp 1.270.000 atau sekitar 29% dari jumlah sampel.

Terdapat 16 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemeliharaan sebesar > Rp 1.270.000 atau sekitar 16% dari jumlah sampel. Terdapat 36 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemanenan sebesar Rp 500.000 – Rp 750.000 atau sekitar 36% dari jumlah sampel. Terdapat 29 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemanenan sebesar Rp 750.000 – Rp 1.000.000 atau sekitar 29% dari jumlah sampel. Terdapat 23 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemanenan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.250.000 atau sekitar 23% dari jumlah sampel. Terdapat 12 petani yang memiliki pengeluaran dalam proses pemanenan sebesar > Rp 1.250.000 atau sekitar 12% dari jumlah sampel. Terdapat 32 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 500.000 – Rp 750.000 atau sekitar 32% dari jumlah sampel. Terdapat 33 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 750.000 – Rp 1.000.000 atau sekitar 33% dari jumlah sampel.

Terdapat 21 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.250.000 atau sekitar 21% dari

jumlah sampel. Terdapat 14 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar > Rp 1.250.000 atau sekitar 14% dari jumlah sampel. Terdapat 16 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 2.000.000 – Rp 4.000.000 atau sekitar 23,2% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 17 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 atau sekitar 24,6% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 20 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 sekitar 29,0% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 16 petani yang memiliki pengeluaran lain sebesar > Rp 8.000.000 atau sekitar 23,2% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan.

Pengeluaran dalam garapan diambil dari beberapa aspek, yakni pangan, listrik, biaya pendidikan, komunikasi dan transportasi. Terdapat 24 petani yang memiliki pengeluaran pangan sebesar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 atau sekitar 24% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 46 petani yang memiliki pengeluaran pangan sebesar Rp Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 atau sekitar 46% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 19 petani yang memiliki pengeluaran pangan sebesar Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 sekitar 19% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 11 petani yang memiliki pengeluaran pangan sebesar > Rp 2.000.000 atau sekitar 11% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 19 petani yang memiliki pengeluaran listrik sebesar Rp 30.000 – Rp 50.000 atau sekitar 19% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 35 petani yang memiliki pengeluaran listrik sebesar Rp 50.000 – Rp 70.000 atau sekitar 35% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 34 petani yang memiliki pengeluaran listrik sebesar Rp 70.000 – Rp 90.000 sekitar 34% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 12 petani yang memiliki pengeluaran listrik sebesar > Rp 90.000 atau sekitar 12% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 33 petani yang memiliki pengeluaran pendidikan sebesar Rp 200.000 – Rp 300.000 atau sekitar 33% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan.

Terdapat 36 petani yang memiliki pengeluaran pendidikan sebesar Rp 300.000 – Rp 400.000 atau sekitar 36% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 22 petani yang memiliki pengeluaran pendidikan sebesar Rp 400.000 – Rp 500.000 sekitar 22% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 9 petani yang memiliki pengeluaran pendidikan sebesar > Rp 500.000 atau sekitar 9% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 33 petani yang memiliki pengeluaran komunikasi sebesar Rp 20.000 – Rp 30.000 atau sekitar 33% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 39 petani yang memiliki pengeluaran komunikasi sebesar Rp 30.000 – Rp 40.000 atau sekitar 39% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 28 petani yang memiliki pengeluaran komunikasi sebesar Rp 40.000 – Rp 50.000 sekitar 28% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan.

Terdapat 43 petani yang memiliki pengeluaran transportasi sebesar Rp 50.000 – Rp 150.000 atau sekitar 43% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 44 petani yang memiliki pengeluaran transportasi sebesar Rp 150.000 – Rp 250.000 atau sekitar 44% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 8 petani yang memiliki pengeluaran transportasi sebesar Rp 250.000 – Rp 350.000 sekitar 8% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan. Terdapat 5 petani yang memiliki pengeluaran transportasi sebesar > Rp 350.000 atau sekitar 5% dari jumlah petani penggarap penyewa lahan.

C. Nilai Tukar Petani

Dalam RTRW kabupaten Mojokerto 2012-2032 pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwasannya kawasan peruntukan hutan produksi terdapat di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Dawarblandong, dan Kecamatan Gedeg. Serta dalam pasal 55, Kecamatan Gedeg menjadi kawasan perkotaan *interchange* tepatnya di Desa Pagerluyung. Hal ini berdampak langsung terhadap pola aktifitas masyarakat petani dalam mengolah lahan garapannya. Petani tidak hanya mengandalkan pertanian sebagai sumber utama pendapatan, melainkan banyak pekerjaan lain yang bisa menjadi sumber pendapatan sejalan dengan proses menuju kawasan perkotaan *interchange*. Seperti berdagang, dan buruh pabrik, supir dan sebagainya. Pengukuran kesejahteraan petani bisa diukur melalui hasil NTPRP total pengeluaran, dengan nilai rata-rata 1,13, yang artinya bisa dikatakan bahwa petani bersifat tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan subsistennya. Dalam penelitian ini disadari bahwasannya indikator yang digunakan dalam variabel pengeluaran kurang bersifat menyeluruh, masih ada faktor yang perlu dijadikan pertimbangan pada variabel pengeluaran seperti pengeluaran tanggungan kredit, dan aktifitas sosial, sehingga memungkinkan tingkat akurasi hasil yang lebih tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan yang diambil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan para petani penggarap di Kecamatan Gedeg memiliki pendapatan tiap bulan lebih besar dari pendapatan non pertanian. Hal ini berarti sebagian besar petani penggarap berorientasi dengan aktifitas non pertanian, seperti usaha dagang, jasa, dan buruh non pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Rata-rata NTP penggarap sebesar 1,142 yang artinya petani penggarap mampu memenuhi kebutuhan subsistennya. Tingginya NTP sangat dipengaruhi oleh tingginya pendapatan khususnya pendapatan non pertanian dibandingkan dengan pengeluaran.

Saran

Saran yang bisa disampaikan dalam penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah pendapatan yang diterima petani penggarap berasal dari dua sumber pendapatan, yaitu pendapatan pertanian dan pendapatan non pertanian. Proporsi pendapatan pertanian jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan non pertanian. Artinya petani penggarap di Kecamatan Gedeg sudah menuju pada pergeseran dari masyarakat agraris ke non agraris. Pengeluaran lebih besar dianggarkan dalam hal kebutuhan pangan dibandingkan dengan kebutuhan lain seperti listrik, pdam, dan biaya pendidikan. Beberapa faktor yang dikategorikan ke dalam pengeluaran tidak dimasukkan sebagai indikator variabel, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianto, D. 2010. *Analisis Pengaruh Stok Beras, Luas Panen, Rata-Rata Produksi, Harga Beras, dan Jumlah Konsumsi Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Tengah*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro
- Amang, B., Sawit, M.H. 1999. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional Pelajaran dari Orde Baru dan Era Reformasi*. Jakarta: IPB Press.
- Ambarinanti, M. 2007. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi dan Ekspor Beras Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ansyar, A. 2014. *Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Pemilik Penggarap dan Petani Penggarap pada Usaha Gula Kelapa Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma*. Skripsi tidak diterbitkan. Bengkulu: Universitas Bengkulu
- Arifin, Bustanul. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- BPS. 2016. *Kabupaten Mojokerto dalam angka 2015*. Mojokerto
- BPS. 2016. *Kecamatan Gedeg dalam angka 2015*. Mojokerto
- Departemen Pertanian. 2013. *Analisis NTP Sebagai Bahan Penyusunan RPJMN 2015-2019*. Jakarta

